

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu faktor dari keberhasilan demokrasi di suatu negara. Akan tetapi, untuk mengindikasikan pemilu yang demokratis warga perlu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemilu serta pemerintah perlu menyerahkan hak suara sepenuhnya kepada pemilih. Pemerintah tidak boleh mengintervensi ataupun memaksa warganya untuk memilih ataupun tidak memilih dalam pemilu. Kebebasan memilih pemilih dalam kegiatan pemilu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, tepatnya tercantum di pasal 43 mengenai hak turut serta dalam pemerintahan, dimana pada pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, warga negara yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih bisa dengan bebas menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Secara tersirat juga dapat dikatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk tidak memilih atau *Abstain* dalam pemilu serta perilaku tersebut tidak akan menyalahi aturan perundang-undangan ataupun demokrasi suatu negara.

Masyarakat yang menggunakan hak suaranya untuk tidak memilih dalam kegiatan pemilu di Indonesia lebih dikenal sebagai Golongan Putih (golput). Golput dipopulerkan pertama kali pada masa orde baru sebagai gerakan perlawanan untuk pemerintah tepatnya Partai Golongan Karya (Golkar) yang selalu dimenangkan di setiap pemilu. Sampai saat ini gerakan golput masih tetap hadir dan eksis di setiap kegiatan pemilu meskipun pemaknaannya sudah berbeda jauh dari pemaknaan awalnya. Pada masa orde baru, golput dilakukan karena adanya permasalahan berupa manipulasi suara, yaitu kertas kosong yang dicoblos oleh penyelenggara pemilu. Hal tersebut membuat masyarakat memilih untuk golput agar kertas mereka tidak disalahgunakan oleh penyelenggara pemilu. Berbeda dengan masa sekarang yang mana golput terjadi karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aktor politik yang

ada. Walaupun begitu, golput tetap bisa dianggap menjadi bagian dari demokrasi karena golput tetap menjadi bagian dari hak pilih warga yang merasa tidak suka atau tidak memiliki kecocokan dengan kandidat ataupun sistem pemilu yang ada.

Namun, keputusan golputnya pemilih dalam pemilu juga perlu diperhatikan kembali terutama oleh negara karena bisa saja masyarakat memutuskan untuk golput akibat kesalahan teknis dalam pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang merencanakan setiap kegiatan pemilu perlu memperhatikan kembali alasan para pemilih yang memutuskan untuk golput agar sistem pemilu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Faktor kinerja sebelumnya dari calon kandidat juga perlu diperhatikan kembali terutama oleh partai politik karena kinerja dari calon kandidat juga menjadi salah satu alasan dari golputnya warga negara. Oleh karena itu, baik partai politik ataupun calon kandidat perlu memperhatikan kembali mengenai kinerjanya masing-masing, dengan begitu warga negara bisa memilih salah satu dari kandidat yang ada dalam pemilu.

Dengan memperhatikan dan memperbaiki hal tersebut, masyarakat yang golput bisa lebih di minimalisir angkanya dan tidak melebihi jumlah suara dari kandidat pemenang. Dalam beberapa kegiatan pemilu, suara dari golput seringkali melebihi jumlah suara dari pasangan pemenang. Fenomena tersebut pernah terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Depok, Jawa Barat. Dari data yang diambil melalui laman resmi KPU Kota Depok yang dapat diakses pada laman <https://kota-depok.kpu.go.id/>, Pilkada Kota Depok selalu menghasilkan suara golput yang lebih tinggi dari suara pemenang.

Tabel 1 Perbandingan Suara Pilkada di Kota Depok Tahun 2010, 2015, dan 2020

Tahun	Pemenang	Jumlah Pemilih	Jumlah Suara Pemenang	Jumlah suara Golput	Daftar Pemilih Tetap
2010	Nur Mahmudi Ismail - Mohammad Idris	572.048 (54%)	227.744 (22%)	481.363 (46%)	1.054.155
2015	Mohammad Idris - Pradi Supriatna	692.865 (57%)	411.367 (34%)	529.227 (49%)	1.222.092

2020	Mohammad Idris - Imam Budi Hartono	777.737 (63%)	415.657 (34%)	451.625 (37%)	1229.362
------	------------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Sumber: *Data Sekunder (laman Resmi KPU Kota Depok <https://kota-depok.kpu.go.id/>)*

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa selama tiga periode pilkada, suara dari golput selalu mendominasi. Walaupun begitu, suara golput pada pilkada Kota Depok Tahun 2020 cukup menurun. Pada tahun 2020, total pemilih di Kota Depok ada sebanyak 1.229.362 orang, tetapi angka pemilih hanya sebesar 777.737 (63%) orang. Ada 451.625 (37%) masyarakat Kota Depok yang melakukan golput atau tidak datang ke TPS. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwasannya ada masalah yang perlu ditelusuri kembali oleh KPU Kota Depok yaitu mengenai partisipasi masyarakat Kota Depok dalam kegiatan pilkada yang masih belum mencapai target. Adapun arget suara yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia yaitu sebesar 77,5%. Dari data tersebut juga diketahui bahwa suara dari masyarakat Kota Depok yang golput masih lebih banyak dibandingkan suara dari pasangan Mohammad Idris - Imam Budi Hartono yang merupakan pemenang sah dari pilkada di Kota Depok. Dimana suara dari golput ada sebanyak 451.625 (37%) sedangkan jumlah suara dari pemilih pasangan Idris - Imam ada sebanyak 415.657 (34%). Dengan begitu, selisih suara antara pemilih yang golput dan pemilih pasangan Mohammad Idris - Imam Budi Hartono ada sebesar 66.361 atau sebesar 6,12%.

Tabel 2 Jumlah Sebaran Pemilih di 11 Kecamatan di Kota Depok

No	Wilayah	Jumlah Suara TPS	Jumlah Golput	Jumlah Keseluruhan DPT
1	Pancoran Mas	101.176 (64%)	56.091 (36%)	157.267 (100%)
2	Cimanggis	87.282 (59%)	60.338 (41%)	147.620 (100%)
3	Sawangan	72.862 (73%)	26.846 (27%)	99.708 (100%)
4	Limo	40.711 (66%)	20.844 (34%)	61.555 (100%)
5	Sukmajaya	97.030 (58%)	71.605 (42%)	168.635 (100%)
6	Beji	64.486	36.039	100.525

		(64%)	(36%)	(100%)
7	Cipayung	64.010 (65%)	33.966 (35%)	97.976 (100%)
8	Cilodong	61.427 (61%)	38.844 (39%)	100.271 (100%)
9	Cinere	29.744 (56%)	23.440 (44%)	53.184 (100%)
10	Tapos	106.514 (65%)	58.043 (35%)	164.557 (100%)
11	Bojongsari	52.495 (67%)	25.569 (33%)	78.064 (100%)
	Depok	777.737 (63%)	451.625 (37%)	1.229.362 (100%)

Sumber: Data Sekunder (laman Resmi KPU Kota Depok <https://kota-depok.kpu.go.id/>)

Dari tabel 2 dapat terlihat bahwa tidak ada satupun kecamatan di Kota Depok pada Pilkada Tahun 2020 yang sudah mencapai target sebesar 77,5%. Suara pemilih yang dicapai hanya 63% dari keseluruhan wilayah Kota Depok.

Pada tahun 2020, sebanyak 133.405 jiwa terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok sebagai penyandang Masalah Sosial dan Kesejahteraan dengan 21 jenis masalah sosial.

Tabel 3 Permasalahan Sosial dan Kesejahteraan di Kota Depok

NO	Jenis Masalah Sosial	Jumlah
1	Anak terlantar usia 6-17 tahun	1.200
2	Anak berhadapan dengan hukum	129
3	Anak jalanan	250
4	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	236
5	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	45
6	Lanjut usia terlantar	330

Andini Ela Prasetya, 2023

ANALISIS PENGARUH ABSTENTION (GOLONGAN PUTIH) PADA PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

7	Penyandang disabilitas	2.759
8	Tuna susila	243
9	Gelandangan	411
10	Pengemis	547
11	Pemulung	212
12	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	20
13	Penderita HIV/AIDS	352
14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	67
15	Korban <i>Trafficking</i>	1
16	Korban tindak kekerasan	162
17	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.053
18	Fakir Miskin	99.121
19	Keluarga bermasalah sosial psikologis	115
20	Keluarga berumah tidak layak huni	10.191
21	Korban bencana alam	15.961
	Jumlah Keseluruhan	133.405

Sumber: Sekunder (Kota Depok dalam Angka 2022 (depokkota.bps.go.id))

Dari tabel 3 dapat terlihat bahwa permasalahan terbesar yang ada di Kota Depok merupakan kemiskinan dengan jumlah fakir miskin sebesar 99.121 jiwa.

Tabel 4 Data Kemiskinan Kota Depok

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Persentase penduduk
-------	------------------	-----------------	---------------------

Andini Ela Prasetya, 2023

ANALISIS PENGARUH ABSTENTION (GOLONGAN PUTIH) PADA PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

2015	496.747	49.970	2,40
2016	522.934	50.560	2,34
2017	556.470	52.338	2,34
2018	615.255	49.390	214
2019	644.860	49.350	2,07
2020	688.194	60.434	2,45

Sumber: Sekunder (Kota Depok dalam Angka 2022 (depokkota.bps.go.id))

Pada data survei yang telah dikeluarkan oleh BPS Kota Depok dalam laman depokkota.bps.go.id jumlah penduduk miskin di Kota Depok ada sebesar 60,434 jiwa dari total penduduk sebanyak 1,851,878 jiwa. Adapun garis kemiskinan atau jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu sebesar 688.194. Rumah Tangga miskin yang menerima program bantuan dari pemerintah kota Depok yaitu sebesar 16,38%. Hal ini diperkuat dengan data survei yang dilakukan oleh lembaga survei INDODATA yang memperlihatkan bahwa permasalahan mengenai bantuan sosial atau bantuan bahan pokok makanan menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kota Depok.

Gambar 1 Data Kondisi Permasalahan Kota Depok Tahun 2020



Sumber: Data Sekunder (Survei INDODATA)

Pada tahun 2019, terdapat fenomena pandemi global yaitu *COVID-19* yang membuat

Andini Ela Prasetya, 2023

ANALISIS PENGARUH ABSTENTION (GOLONGAN PUTIH) PADA PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

manusia bisa tertular virus dan meninggal dunia hanya dengan waktu yang singkat. COVID-19 muncul di Indonesia untuk pertama kali pada tahun bulan maret tahun 2020 dengan kasus pertama berada di Kota Depok. Berita akan bahaya COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan darurat berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang juga diberlakukan di Kota Depok. Kebijakan tersebut membuat masyarakat Kota Depok harus melakukan aktivitas dirumah karena masifnya penyebaran *Coronavirus* yang menimbulkan banyaknya korban meninggal dunia serta mengingat kasus COVID-19 pertama kali juga ditemukan di Kota Depok. Hal inilah yang bisa menjadikan salah satu alasan munculnya golput pada Pilkada di Kota Depok yang dilaksanakan pada tahun 2020 sewaktu pandemi COVID-19 terjadi.

Selanjutnya, *COVID-19* membuat pendapatan dari beberapa sektor kerja seperti perhotelan, rumah makan, ataupun tempat wisata menurun bahkan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal karena perusahaan kesulitan menggaji karyawannya. Permasalahan tersebut menimbulkan banyaknya masyarakat Kota Depok yang akhirnya menyentuh garis kemiskinan dimana pada tabel 4 terlihat bahwa kemiskinan meningkat sebanyak 11.000 atau sebesar 0,38 persen pada tahun 2020 atau pada tahun pertama kali COVID-19 muncul.

Melihat pada data permasalahan yang ada, dapat dikatakan bahwa permasalahan yang masih belum teratasi tersebut bisa menjadi salah satu penentu keputusan suara dari masyarakat untuk memilih atau tidak memilih dalam Pilkada Kota Depok. Karena selain dari kesalahan teknis atau sistem yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kesesuaian dari program yang dibawa oleh kandidat bisa menjadi penentu keputusan suara masyarakat. Terutama program yang dibawa khusus untuk mengatasi angka kemiskinan seperti bantuan sosial atau bahan pokok murah dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dalam data Jumlah Pemilih yang diambil dan dapat diakses melalui laman ourworldindata.org terlihat bahwa pada *General Election*, Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 9 negara di The Association of South East Nations (ASEAN) yang melangsungkan pemilihan umum (Negara Brunei Darussalam tidak termasuk dalam daftar karena merupakan negara Kesultanan atau negara monarki absolut).

Tabel 5 Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di ASEAN

No	Negara	% Pemilih	% Golput	Keterangan
1	Laos (2021)	98,02%	1,98%	Negara Komunis dengan sistem kepartaian negara 1 partai. Kegiatan pemilu yang dilakukan pada masa pandemi tidak mempengaruhi jumlah suara di negara Laos.
2	Singapura (2020)	95,81%	4,19%	Negara yang menggunakan sistem <i>Mandatory Votes</i> yaitu mewajibkan masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum. Diterapkan pada tahun 1959 dengan denda sebesar \$5.00 dan tidak diperbolehkan untuk memilih kembali di pemilihan umum selanjutnya kecuali bisa menjelaskan alasan melakukan golput. (Before 1955 - 52,7%) (Application 1959 - 90,1) until now the voters turnout always stable in range 90%. Kegiatan pemilu yang dilakukan pada saat pandemi tidak membuat jumlah pemilih menurun dan tetap mengalami kestabilan dengan jumlah pemilih diatas 90% serta bertambah sebanyak 2% dari tahun yang sebelumnya.
3	Vietnam (2021)	95,6%	4,4%	Negara Komunis dengan sistem kepartaian negara 1 partai. Pemilu yang dilaksanakan pada masa pandemi membuat jumlah pemilih menurun sebesar 3,66% dari sebelumnya pada tahun 2016 jumlah pemilih sebesar 99,26%. Walaupun begitu, Vietnam tetap mempertahankan jumlah suara mereka diatas 90%.
4	Filipina (2022)	83,83%	16,17%	<i>Mandatory Vote</i> dipraktikkan pertama kali pada 1972 sampai 1986. Sebelum pemberlakuan (1969) persentase pemilih sebesar 88,6%. Saat pemberlakuan (1978) persentase pemilih sebesar 85,52%. Setelah pemberlakuan dihentikan (1987) persentase suara ada sebesar 90%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemberlakuan

Andini Ela Prasetya, 2023

ANALISIS PENGARUH ABSTENTION (GOLONGAN PUTIH) PADA PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

				<p>Mandatory Votes tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan pada jumlah suara pemilih.</p> <p>Pemilu yang dilaksanakan dimasa pandemi tidak membuat jumlah pemilih menurun dan mengalami kenaikan sebesar 9,52% dari tahun sebelumnya atau tahun 2019 yang memiliki jumlah pemilih sebesar 74,31.</p>
5	Kamboja (2018)	83,02%	16,98%	Pada tahun 2018 penyelenggaraan pemilu dianggap tidak demokratis dikarenakan adanya pembubaran partai oposisi yang membuat pemilu hanya diikuti oleh 1 kandidat.
6	Indonesia (2019)	81,93%	18,07%	Kenaikan jumlah pemilih dari sebelumnya tahun 2014 sebesar 75% menjadi 81,93%
7	Timor-leste (2022)	77,26%	22,74%	Terdapat kenaikan jumlah pemilih sebesar 6,10% dari sebelumnya tahun 2017 sebesar 71,16% menjadi 77,26%. Terlepas dari kegiatan pemilu dilaksanakan pada masa pandemi, jumlah pemilih tidak mengalami penurunan melainkan mengalami kenaikan.
8	Thailand (2023)	75,71%	24,29%	Pemberlakuan <i>Mandatory Vote</i> sejak 1997 - dalam Konstitusi tahun 1997 Bab 1 Bagian 68 disebutkan bahwa Setiap orang wajib menggunakan hak pilihnya. Sebelum pemberlakuan (1996) persentase pemilih sebesar 62,6. Setelah pemberlakuan (2001) persentase pemilih naik menjadi 69,95. Pada tahun 2014 persentase pemilih menjadi yang terendah yaitu sebesar 40%. Oleh karena itu, pemberlakuan <i>Mandatory Vote</i> di Thailand belum memberikan efek baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
9	Malaysia (2022)	74,04%	25,96%	Hasil dalam pemilu yang diadakan dimasa pandemi pada tahun 2022 menurun sebesar 8% dari tahun 2018 yang memiliki presentasi sebesar

				82,32%.
10	Myanmar (2020)	71,89%	28,11%	Partai Militer Myanmar kalah dalam pemilu dan memprotes hasil pemilu yang berakhir munculnya kudeta.
11	Brunei Darussalam			Monarki Absolut (Kesultanan)

Sumber: *Data Sekunder (Laman Resmi International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) <https://ourworldindata.org/grapher/voter-turnout?time=®ion=Asia>)*

Dapat terlihat pada tabel bahwasannya mandatory votes bisa mendorong kenaikan jumlah pemilih yang bisa cukup drastis apabila diterapkan hukuman atau sanksi apabila tidak memilih. Hal ini perlu dilakukan di Indonesia terutama pada pemilihan kepala daerah yang memang didata memiliki jumlah golput yang cukup tinggi. Terlepas dari kebebasan masyarakat untuk memilih, pemerintah tetap harus mendorong masyarakat untuk tidak apatis pada daerahnya sendiri dan bisa mengawasi serta kritis kepada pemerintah kota terhadap kebijakan yang mereka bentuk.

I.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ataupun karya tulis yang membahas mengenai fenomena golput di pemilu Indonesia baik pada tahun 2020 atau sebelumnya sudah banyak ditemukan. Namun, penelitian mengenai fenomena golput pada tahun 2020 ataupun sebelumnya di Kota Depok masih belum ditemukan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti terlebih pada pilkada tahun 2020 di Kota Depok jumlah suara golput lebih banyak dari jumlah suara pemenang yaitu pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono. Akan tetapi, ada beberapa literatur terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Pertama, artikel jurnal *European Journal of Political Economy* Volume 77 ISSN 0176-2680 milik Matteo Picchio dan Raffaella Santolini (2021) dengan judul “The COVID-19 Pandemic’s Effects on Voter Turnout”. Jurnal tersebut bertujuan untuk menilai apakah partisipasi pemilih yang menurun dalam pemilihan kepala daerah 2020 di Italia dipengaruhi oleh pandemi. Dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa

peningkatan 1 persen angka kematian pada lansia menurunkan jumlah pemilih sebesar 0,5 persen. pada kota dengan penduduk yang padat peningkatan 1 persen ada angka kematian lansia menurunkan jumlah pemilih sekitar 1,2 persen. Dapat dikatakan bahwa pemilu yang diadakan selama pandemi dapat membuat masyarakat untuk menolak pergi ke tempat pemungutan suara dan hal tersebut membuat indeks dari demokrasi menjadi lemah. Oleh karena itu, menunda dan melaksanakan pemilu disaat kondisi sudah kondusif dapat menjadi strategi alternatif yang baik untuk mengurangi resiko penyebaran virus serta dapat meningkatkan jumlah partisipasi dari pemilih. Artikel tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu melihat alasan dari penolakan masyarakat untuk datang ke TPS dikarenakan pemilihan umum yang dilaksanakan saat pandemi. Hal tersebut relevan, karena pilkada di Kota Depok tahun 2020 juga dilakukan saat pandemi serta jumlah partisipasinya masih lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu serentak tahun 2019. Perbedaaan terletak dari wilayah penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di Italia sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Depok. Perbedaan selanjutnya terlihat bahwa faktor yang mendasari partisipasi pemilih yang berkurang di Italia dikarenakan pelaksanaan pilkada pada pandemi sedangkan penelitian ini akan melihat faktor-faktor lainnya yang kemungkinan mendasari angka penurunan partisipasi pemilih ini.

Kedua, artikel jurnal ilmiah Jurnal Professional FIS UNIVED Vol. 7 No.2 ISSN: 2722-371X yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2020 dengan terakreditasi Sinta 5 dan Garuda milik Linda Astuti dengan judul “Analisis Bentuk Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis perilaku golongan putih dalam pemilihan umum di Desa Betungan Kota Bengkulu. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu teori perubahan perilaku Kurt Lewin. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan informan dari penduduk Desa Betungan dan penyelenggara pemilu. Dari penelitian tersebut ditemukan kesimpulan bahwa warga Desa Betungan tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara karena lebih mementingkan urusan pribadi seperti memilih untuk bekerja atau melakukan kegiatan pribadi lainnya yang dianggap lebih penting. Warga Kelurahan Betungan juga merasa dilema untuk memilih karena adanya perilaku buruk para dewan legislatif sampai sekarang yang membuat masyarakat tidak percaya untuk menggantungkan harapan lagi kepada mereka. Selanjutnya, warga

yang memilih bukan karena pilihan hati nurani mereka melainkan karena sudah diberikan imbalan sebelumnya dan memilih karena adanya ikatan keluarga dengan kandidat. Penelitian tersebut relevan karena penelitian ini akan melihat perilaku masyarakat golput di Kota Depok pada Pilkada Kota Depok Tahun 2020. Perbedaan penelitian terletak pada daerah penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Desa Betungan Kota Bengkulu, sedangkan penelitian ini nantinya akan dilakukan di Kota Depok.

Ketiga, artikel Jurnal Budapest International Research and Critics Institute Journal Vol2, No 3 EISSN: 2615-3076 ISSN 2615-1715 milik Jochua Abrao Baloi (2019) dengan judul *“The Vote of Silence: The Problem of Abstention in Municipal Elections in Mozambique”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis permasalahan golput dalam pemilihan kota di Mozambik, Kota Matola, Provinsi Maputo. Dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran dalam pemilihan umum merupakan pertanyaan politik untuk menunjukkan ketidakpuasan dan protes terhadap kegiatan pemilihan umum itu sendiri. Pada beberapa negara demokrasi barat yang representatif yang salah satunya adalah negara Mozambik, baru-baru ini mengalami persentase suara golput yang cukup tinggi dalam pemilu. Hal tersebut terjadi karena kurangnya legitimasi dan transparansi dari penyelenggara pemilu, kerapuhan pada institusi politik dan publik, kurangnya budaya politik pemilu, serta kurangnya pendidikan mengenai pemilihan umum.. Oleh karena itu, cara untuk meminimalisasi ketidakhadiran dalam pemilu di Kota Matola yaitu dengan menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kewarganegaraan dimana warga harus merasa bahwa suara mereka akan memiliki dampak yang besar untuk pemerintahan. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu menganalisis permasalahan golput dalam pemilihan kepala daerah. Adapun perbedaan terletak pada wilayah penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di Kota Matola sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kota Depok.

Keempat, artikel jurnal ilmiah Ganesha Civic Education Journal Volume 3, No 1 P-ISSN: 2714-7967 E-ISSN: 2722-8304 Universitas Pendidikan Ganesha milik Ketut Andita Pratidina Lestari (2021) mengenai *“Semakin Meningkatnya Persentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan HAM”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendalami perilaku golput dilihat dari

perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur. Data yang ditemukan yaitu, ada tiga faktor yang membuat masyarakat memilih untuk golput, yaitu faktor psikologis, faktor sosial ekonomi, dan faktor rasional. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi seseorang untuk akhirnya memutuskan menjadi golput. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu melihat faktor apa saja yang membuat masyarakat Depok akhirnya memutuskan menjadi golput. Terlebih penelitian tersebut juga membahas mengenai pemilu dikala pandemi yang mana situasi tersebut sesuai dengan keadaan pada pilkada Depok pada tahun 2020. Perbedaan terletak pada perspektif yang diambil oleh peneliti terdahulu, yaitu perspektif hukum dan HAM, sedangkan peneliti tidak mengaitkan permasalahan partisipasi golput di Depok dengan perspektif apapun.

Kelima, artikel Jurnal Bina Praja Volume 12, No 2 yang terakreditasi sinta 2 milik Suwardi dan Aziz Budiyanto (2020) mengenai “*Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Elections*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang membuat angka pemilih golput pada setiap pemilu di Indonesia naik-turun. penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur dengan merangkum beberapa dokumen yang berkaitan dengan fenomena golput di Indonesia. Data yang ditemukan dari penelitian tersebut, yaitu pada aspek politik, masyarakat memilih untuk golput karena ketidakpercayaan mereka pada partai politik dan tidak percaya pada kandidat yang akan membawa peluang yang baik pada daerah yang dipimpin. Masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk memilih kandidat yang memiliki kesamaan dengan identitas mereka seperti agama, pendidikan, umur, status, dan lain-lain. Misalnya, masyarakat yang beragama kristen tidak akan memilih partai islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, ataupun partai lain yang berorientasikan keagamaan islam. Dengan kata lain, para golput tidak merasakan adanya keterwakilan didalam kandidat pemilu ataupun partai yang bisa mengakomodasi aspirasi para golput. Karena itu, keputusan untuk tidak memilih dalam pemilu merupakan hal terakhir yang bisa mereka ambil. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena membahas mengenai faktor masyarakat golput yang muncul di setiap pemilu. Hal tersebut relevan karena penelitian ini juga akan membahas mengenai faktor masyarakat yang melakukan golput di kota Depok. Perbedaan penelitian terletak pada pengamatan mengenai faktor entitas, yang mana ini tidak relevan dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan.

Keenam, artikel jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 6, No 2 p-ISSN: 2541-657X e-ISSN: 2550-0813 yang telah terakreditasi sinta 5 milik Lindo Karsyah, dkk (2019) mengenai “Golput Terdidik Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami alasan pemilih terdidik yang memutuskan untuk golput pada pilkada 2015 di Kabupaten Sijunjung. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang ditemukan dari penelitian tersebut, yaitu berawal dari beberapa masyarakat golput yang membaca bahan kampanye dan sosialisasi tentang pasangan calon. Selanjutnya, mereka akan melihat rekam jejak pasangan calon. Dari hal tersebut, para golput melihat bahwasannya moral pasangan calon serta kompetensi dari pasangan calon masih rendah. Maksud moral yang rendah adalah pasangan calon yang tidak mau membayar hutangnya pada masyarakat serta memiliki ketidakpekaan pada fenomena korupsi. Masyarakat juga melihat kompetensi yang dimiliki pasangan calon masih rendah, yaitu pasangan calon terlihat tidak memiliki kemampuan memimpin daerah, tidak pandai membuat ikon kabupaten, serta visi misi yang dimiliki terlalu *imaginable*. Dengan alasan tersebut, banyak masyarakat di Kabupaten Sijunjung yang akhirnya memutuskan untuk golput ketimbang harus memilih pasangan calon yang tidak memuaskan mereka nantinya. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai alasan serta faktor masyarakat memutuskan untuk golput. Perbedaan terletak pada daerah penelitian, yaitu penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Sijunjung, sedangkan penelitian ini nantinya akan dilakukan di Kota Depok.

Ketujuh, artikel Jurnal Sociopolitico Volume 1, No 1 E-ISSN 2656-1026 milik Sriyana dan Mardani (2019) mengenai “Fenomena Golongan Putih pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kapuas”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui deskripsi golput serta faktor yang membuat masyarakat memilih untuk golput pada pemilu legislatif (pileg) tahun 2014 di Kabupaten Kapuas. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kesimpulan yang ditemukan dari penelitian tersebut yaitu, citra golput pada pileg tahun 2014 di kabupaten Kapuas yaitu golput ideologis dimana masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kebijakan pemerintah, golput politis

dimana masyarakat tidak menemukan kecocokan dengan pasangan calon, dan golput pragmatis yaitu golput yang mencoba memperhitungkan untung-rugi jika memilih salah satu calon. Selanjutnya, faktor yang membuat masyarakat golput, yaitu: pertama, faktor sosial-ekonomi, yakni pemilih memilih untuk golput karena tidak adanya calon yang mewakili kepentingan mereka. Kedua, faktor psikologi, yakni masyarakat beranggapan bahwa pemilu yang diadakan jenisnya terlalu banyak yang seharusnya pemilu diadakan secara serentak saja agar lebih efisien. Ketiga, faktor rasional, yakni masyarakat yang mencoba mempertimbangkan untung rugi dalam memilih. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas mengenai faktor masyarakat memutuskan untuk golput. Perbedaan terletak pada daerah penelitian, yaitu penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Kapuas, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kota Depok.

Kedelapan, artikel jurnal *International Regional Science Review* Volume 45, No 3 P-ISSN: 0160-0176 E-ISSN: 1552-6925 milik Sebastian Bourdin dan Jiwan Tai (2021) mengenai “*Abstentionist Voting - between disengagement and protestion in neglected areas: a spatial analysis of the Paris Metropolis*”. Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih golput di Ibu Kota Paris. Data penelitian diambil menggunakan data sosial ekonomi dan demografi dengan model spasial. Kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu masyarakat yang memutuskan untuk golput mempercayai bahwa politisi manapun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa mengubah situasi mereka. Sikap golput juga dipercayai sebagai aksi protes. Sikap protes ini lebih banyak ditemukan di daerah tertinggal yang akses pelayanan publiknya masih kurang baik. Terdapat perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu penelitian tersebut ingin melihat daerah mana yang sekiranya memiliki tingkat partisipasi abstain yang tertinggi dan melihat faktor-faktor apa yang sekiranya membuat fenomena abstain terjadi, seperti adakah faktor ekonomi di daerah tersebut yang mempengaruhi keputusan abstain masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang hanya ingin melihat faktor abstain dari masyarakat Depok tanpa melihat faktor tiap daerahnya. persamaannya, yaitu sama sama ingin melihat faktor yang paling dominan dalam fenomena abstain masyarakat.

Kesembilan, artikel jurnal *Electoral Studies* Volume 71 ISSN: 0261-3794 milik

Andini Ela Prasetya, 2023

ANALISIS PENGARUH ABSTENTION (GOLONGAN PUTIH) PADA PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Sirus H. Dehdari, dkk (2020) mengenai "*Selective Abstention in Simultaneous Election: Understanding the Turnout Gap*". Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan kesenjangan jumlah peserta dalam pemilu serentak di Swedia. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan data berupa survei. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat masyarakat memilih untuk abstain, yaitu faktor pendidikan dan ekonomi. Dimana dikatakan bahwa masyarakat dengan ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung akan mendapatkan informasi yang lebih baik daripada masyarakat dengan pendidikan dan ekonomi yang rendah. Dikatakan juga bahwa pengangguran merupakan pemilih yang mayoritasnya memutuskan untuk abstain. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengungkap faktor-faktor dari keputusan abstain pemilih di Swedia, hal ini relevan dengan penelitian yang ingin mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat Depok melakukan Golput. Perbedaannya yaitu penelitian mengenai perbedaan status atau identitas dari pemilih, dimana penelitian tersebut juga ikut membahas mengenai latar belakang dari identitas masyarakat Swedia yang mayoritas melakukan abstain, sedangkan peneliti tidak akan membahas mengenai mayoritas dari latar belakang identitas masyarakat Depok yang melakukan golput.

Kesepuluh, artikel jurnal KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, No. 2 yang telah terakreditasi sinta 4 milik Mahpudin (2021) mengenai "*Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018*". Jurnal tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana kotak kosong bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang kurang puas dengan pasangan calon tunggal. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa studi literatur. Dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase suara pasangan calon yang menang masih rendah dibandingkan dengan akumulasi suara kotak kosong. Yang mana hal tersebut merefleksikan bahwa tidak semua pasangan calon yang menang memiliki basis validasi yang kuat dan bisa jadi kemenangan pasangan calon didasari karena pemilih tidak memiliki alternatif pilihan lain dibalik ketidakpastiannya kemenangan dari suara kotak kosong. Karena pada akhirnya, lebih banyak suara di kotak kosong yang tidak bisa menjadi acuan hasil akhir dalam pemilu. Karena itu, diperlukan payung hukum untuk membuat hasil suara kotak kosong bisa menjadi acuan hasil tetap dan bukan hanya sekedar simbol dari pemilu dengan pasangan calon tunggal. Penelitian tersebut memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai suara protes (kotak kosong) yang masih lebih banyak dibandingkan suara pasangan calon. Penelitian tersebut juga melihat bahwa tidak adanya fungsi dari kotak kosong yang disediakan di TPS karena pemenang-pun sudah ditentukan terlepas dari berapa banyaknya suara di kotak kosong (golput). Sama halnya dengan pilkada di Kota Depok yang mana suara golput lebih banyak ketimbang golput, namun yang memenangi pilkada tetap pasangan calon yang mendapat suara yang banyak. Karena itu, eksistensi dari banyaknya suara golput tidak terlihat pada pilkada ini. Perbedaannya, yaitu penelitian tersebut mengambil jenis pilkada dengan calon tunggal, sedangkan penelitian ini tidak. Kemudian, penelitian tersebut juga meneliti mengenai perlunya hukum yang mengatur mengenai eksistensi dari suara pada kotak kosong (golput), sedangkan penelitian ini hanya akan melihat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya suara golput di Kota Depok tanpa melihat keperluannya dari payung hukum.

I.2 Rumusan Masalah

Dari data yang diambil melalui laman resmi KPU Kota Depok yang dapat diakses pada laman <https://kota-depok.kpu.go.id/>, suara dari masyarakat Depok yang golput masih lebih banyak dibandingkan suara dari pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono yang merupakan pemenang sah dari Pilkada di Kota Depok. Dimana suara dari golput ada sebanyak 451.625 (37%) sedangkan jumlah suara dari pemilih pasangan Idris - imam ada sebanyak 415.657 (34%). Dengan begitu, selisih suara antara pemilih yang golput dan pemilih pasangan Mohammad Idris - Imam Budi Hartono ada sebesar 35.968 suara atau sebesar 3%

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya, yaitu: “Faktor apa saja yang membuat Responden di Kota Depok memutuskan untuk golput pada Pilkada Kota Depok Tahun 2020?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah di buat, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk melihat faktor-faktor yang membuat Responden golput di Kota Depok memutuskan untuk golput dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020, dan
2. Untuk mengatasi permasalahan golput di Depok, agar nantinya fenomena suara golput

yang lebih tinggi dari suara pemenang tidak terjadi kembali.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang sudah disusun, maka penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut:

I.4.1 Manfaat Praktis

Untuk manfaat praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk KPU Kota Depok dan calon kandidat dalam pemilu berikutnya agar membenahi strategi pemilu dan kampanye mereka. Dengan begitu, pemilih golput bisa lebih diminimalisir kehadirannya.

I.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemilih golput pada pilkada tahun 2020 di Depok. Lalu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor munculnya golput pada pemilu.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perlu dibuat sebagai suatu pedoman untuk mempermudah pembaca dalam menangkap pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai alasan peneliti dalam memilih masalah penelitian terkait tingginya suara golput pada pilkada Depok tahun 2020. Setelahnya, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang berkaitan dengan latar belakang. Yang selanjutnya disajikan sistematika penulisan agar memudahkan pembaca untuk memahami pembahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai Konsep pemilu dan pilkada, teori partisipasi politik,

dan Teori Perilaku *Voters Abstention* (Pemilih Golongan Putih). Kemudian ada kerangka pemikiran, kerangka metode Penelitian, dan Hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai (a) objek penelitian yaitu masyarakat Depok yang melakukan golput pada pilkada tahun 2020, KPU Kota Depok, dan Partai Politik di Kota Depok, (b) jenis penelitian berupa Penelitian *Mix Method* dengan model *Embedded Mixed Method*, (c) teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dan studi pustaka, (d) sumber data primer yaitu kuesioner dan wawancara, lalu untuk sumber data sekunder yaitu dokumen terkait penelitian, (e) teknik analisis data, dan (f) Tabel rencana waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian daftar pustaka berisikan referensi ataupun sumber data peneliti dalam menyusun proposal penelitian. Referensi yang digunakan berasal dari buku, undang-undang, jurnal ilmiah, dan skripsi/thesis.